



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KABUDAYAAN, DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS 2024**

Telp : (0281) 637629
www.dinporabudpar.banyumaskab.go.id

Jl. Prof. dr. Soeharso No.45
Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur
Banyumas, 53114

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian Strategi yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan

dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas mendukung misi RPJMD ke 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yaitu :

1. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Rencana Tindak Pengendalian Strategis ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Strategis pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Strategis untuk memberikan acuan Dinporabudpar dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian Strategis di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

1.6 RUANG LINGKUP

Evaluasi RTP Strategis ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinporabudpar kabupaten banyumas. Pelaksanaan RTP Strategis melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkat manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP Strategis untuk tahun 2024 berdasarkan pada Sasaran Strategis Dinporabudpar Kabupaten Banyumas tahun 2018-2024 yaitu meningkatnya pertumbuhan desa, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatnya kelestarian budaya daerah.

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas

pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan

pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.1 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP Strategis merupakan saran untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP Strategis.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Dinporabudpar Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 50 (lima puluh) dari total pegawai 93 (sembilan puluh tiga) terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden yaitu 30% dari total pegawai. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan reviu dokumen menunjukkan hasil bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Kelemahan : Kurangnya disiplin dan motivasi kerja PNS.

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
	Sudah melakukan koordinasi dengan Badan Layanan Pengadaan Serta melakukan survey pasar setempat di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	Tahun 2025 - 2026

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional OPD

Kedua klasifikasi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

No	Konteks	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator
1.	Risiko strategis	<p>Meningkatnya kemandirian pemuda</p> <p>Meningkatkan prestasi dan peran aktif pemuda</p> <p>Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran aktif pemuda</p> <p>Optimalnya potensi kebudayaan dan pariwisata</p>	<p>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p> <p>Persentase peningkatan Prestasi dan Peran aktif Pemuda yang di fasilitasi Dinporabudpar</p> <p>Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif</p> <p>Persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata</p>
2.	Risiko Operasional	<p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pelatihan dan Pengembangan wirausaha muda</p> <p>Jumlah pelatihan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan</p> <p>Jumlah pembinaan SDM Keolahragaan yang dilaksanakan</p>

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten Kota
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Terbina
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Organisasi Olahraga yang Terbina
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan lembaga adat
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kesenian lingkup Bidang Kebudayaan nilai budaya kesejarahan kesenian permuseuman cagar budaya perfilman
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola Pemda
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata

		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata yang memiliki SK
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan pemasaran wisata yang dilaksanakan
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan Jumlah laporan pelaksanaan
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas ekonomi kreatif yang dilaksanakan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis Dinporabudpar

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinporabudpar

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran:

Form 3.b : Identifikasi risiko strategis Dinporabudpar

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Dinporabudpar :

No	Risiko Prioritas
	Risiko Strategis
1	Minimnya partisipasi pemuda dalam dalam ekonomi mandiri
2	Minimnya keikutsertaan pemuda dan pelajar dalam kejuaraan olahraga
3	Minimnya prestasi pemuda dan peran aktif pemuda dalam masyarakat
4	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika: v

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Strategis meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Strategis;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP Strategis, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinporabudpar perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi rapat, koordinasi, konsultasi, FGD dan desk.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII PENUTUP

Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis SPIP Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk evaluasi dan monitoring capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/ sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Maret 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**

Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198607 1 001

LAMPIRAN

**CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHP Inspektorat Tahun 2017 No. 700/080.OP/114/IRB.2/2017	Penyusunan Harga Penyusunan Sendiri (HPS) belum sesuai ketentuan yang berlaku	sudah melakukan koordinasi dengan Badan Layanan Pengadaan serta melakukan survey pasar setempat	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

**SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	- Kurangnya disiplin dan motivasi kerja PNS	Memadai		Kurang Memadai	- Kurangnya disiplin dan motivasi kerja PNS
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	-	Memadai		Memadai	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	-	Memadai		Memadai	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	: Urusan Pemerintahan Pilihan	
OPD yang Dinilai	: DINPORABUDPAR	
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023	
Tujuan Strategis	Meningkatnya daya tarik wisata	
	Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan	
	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	
	Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda	
Sasaran Strategis	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	
	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	
	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	
	Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya : 12,5 %
	2	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda : 100 %
	3	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi : 33,3 %
	4	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda : 50 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1: Meningkatkan daya tarik wisata</u>	
	<u>Sasaran 1.1: Meningkatkan Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda</u>	
	<u>Ind Sasaran 1.1.1: Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda</u>	
	<u>Program 1.1.1.1: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</u>	
	<u>Program 1.1.1.2: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</u>	
	<u>Program 1.1.1.3: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</u>	
	<u>Tujuan 2: Meningkatkan Kebudayaan daerah yang dilestarikan</u>	
	<u>Sasaran 2.1: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya</u>	
	<u>Ind Sasaran 2.1.1: Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya</u>	
	<u>Program 2.1.1.1: PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</u>	
	<u>Program 2.1.1.2: PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</u>	
	<u>Program 2.1.1.3: PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</u>	
	<u>Program 2.1.1.4: PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</u>	

<u>Program 2.1.1.5:</u> PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
<u>Tujuan 3:</u> Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
<u>Sasaran 3.1:</u> Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
<u>Ind Sasaran 3.1.1:</u> Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi
<u>Program 3.1.1.1:</u> PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<u>Tujuan 4:</u> Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda
<u>Sasaran 4.1:</u> Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda
<u>Ind Sasaran 4.1.1:</u> Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda
<u>Program 4.1.1.1:</u> PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
<u>Program 4.1.1.2:</u> PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
<u>Program 4.1.1.3:</u> PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Purwokerto, 15 Maret 2024
KEPALA DINPORABUDPAR
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si
Pembina Utama Muda
19660127 198607 1 001

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KAB. BANYUMAS

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya daya tarik wisata	1	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	1	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	Adanya kemungkinan gangguan keamanan pada destinasi wisata (Aspek Destinasi Pariwisata)	326	2,19222E+12	Kurang disiplin petugas Pamgab	Internal	C	Pengunjung trauma bila ada kecelakaan	POLRES, KODIM	DINPORABUDPAR
						Kinerja POKDARWIS sebagai mitra pendukung pariwisata kurang optimal (Risiko kemitraan)	326	2,19222E+12	SDM POKDARWIS kurang memiliki kompetensi dalam pengembangan pariwisata desa	Internal	C	kegiatan pariwisata di desa kurang berkembang dengan maksimal	Forum Komunikasi POKDARWIS Kabupaten Banyumas	DINPORABUDPAR
						Kurangnya daya saing Obyek wisata yang dikelola BLUD berpotensi tidak berkembang (Aspek Pemasaran)	326	2,19222E+12	1. sudah tidak ada daya jual dikarenakan tidak ada inovasi atau perubahan 2. tidak ada dukungan dari stakeholder terkait 3. keterbatasan untuk melakukan inovasi/ perubahan di setiap objek	Internal	C	1. penurunan tiket kunjungan setiap periodik 2. tidak adanya daya jual dari objek yang bisa ditawarkan kepada pihak ke 2 3. operasional objek bisa tidak tercover dari jumlah pendapatan objek	BLUD dan Pemerintah Daerah	DINPORABUDPAR
						Kurangnya Even Kegiatan atau Acara Kesenian yang terselenggara	326	2,19222E+12	Kurangnya kerjasama dengan penyelenggara	Internal	C	Tidak terjadi peningkatan jumlah kunjungan di objek wisata	UPT Dinporabudpar	DINPORABUDPAR

						Objek Wisata Menara Teratai : 1. Belum tercapainya ekspektasi pendapatan sesuai target (Aspek Pemasaran) 2. Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Menara Teratai (Aspek Kelembagaan)	326	2,19222E+12	Masih belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan objek wisata PEN	Internal	C	Kurang maksimalnya pendapatan yang diperoleh BLUD	Pemerintah Daerah dan BLUD	DINPORABUDPAR
									Banyaknya parkir di bahu jalan bung karno dan di depan menara teratai yang tidak diberikan ketegasan oleh Dinas Perhubungan menyebabkan pengunjung lebih banyak parkir di bahu jalan dibandingkan di kantong parkir menara teratai	Eksternal	UC	Penurunan angka pendapatan parkir	BLUD dan Pemerintah Daerah	DINPORABUDPAR
						Objek Wisata Tamana Botani : Tidak jelas nya objek wisata Taman Botani yang harusnya untuk wisata edukasi terkait Botani namun tidak terealisasi (Aspek Pemasaran Wisata)	326	2,19222E+12	Informasi edukatif terkait tanaman tidak terdata dengan baik dan tidak beraturannya lokasi penataan tanaman-tanaman tsb.	Internal	C	Tingkat Kunjungan menurun drastis karena pengunjung merasa tidak ada konten edukatif yang diperoleh saat berkunjung ke Taman Botani	BLUD dan pemerintah daerah	DINPORABUDPAR

					Objek Wisata Taman Maskemambang : 1. Sedikit pengunjung ke Taman Apung Mas Kemambang pada jam operasional siang hari karena pengunjung kurang nyaman (Aspek Destinasi Wisata) 2. Penurunan tingkat kunjungan yang akan terjadi secara periodik (Aspek Destinasi Wisata)	326	2,19222E+12	Semua tanaman yang ada di Maskem adalah bibit dan kebanyakan tanah yang ada di Makem adalah bukan tanah subur sehingga butuh 20 tahun untuk pohon tsb bisa rindang dan pergantian tanah supaya tanamannya tumbuh.	Eksternal	UC	Penurunan angka kunjungna karena jam berkunjung oleh pengunjungterbatas hanya di sore sampai dengan malam hari.	BLUD dan Pemerintah Daerah	DINPORABUDPAR
					Tidak adanya daya tarik yang ada di Taman Apung Maskemambang dikarenakan orang hanya masuk melihat genangan air dan tanaman yang belum jadi.				Eksternal	UC	Tidak akan lagi ada wisatawan yang datang ke Taman Apung Maskemambang.	BLUD dan Pemerintah Daerah	DINPORABUDPAR
					Pendapatan tiket wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak optimal (risiko kecurangan)	326	2,19222E+12	Adanya kolusi antara pengunjung dengan petugas tiket/ pengelola tempat wisata	Internal	C	1. Dampak keuangan, 2. Dampak reputasi, 3. Dampak Kinerja, 4. Dampak budaya	UPT pada Dinporabudpar dan BLUD	DINPORABUDPAR
2	Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan	2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	2	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	222	2,19222E+12	Kurangnya sosialisasi dan fasilitas kebudayaan di masyarakat	Internal	C	Berkurangnya pelaku budaya di lingkungan masyarakat	Pelaku Budaya dan Pemerintah daerah	DINPORABUDPAR

3	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	3	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	3	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas (Aspek Industri)	326	2,19222E+12	fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang kurang optimal pada seluruh sub sektor ekonomi kreatif	Internal	C	Pelaku usaha dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif banyak yang tidak mampu bertahan	Pelaku usaha dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif	DINPORABUDPAR
					Pengurus Komite Ekonomi Kreatif kurang aktif (Aspek Kelembagaan)	326	2,19222E+12	Kurang koordinasi dan pengawasan Komite Ekonomi kreatif oleh Dinas	Internal	C	Sektor Ekonomi Kreatif Menjadi Kurang Berkembang	Komite Ekonomi Kreatif kabupaten Banyumas	DINPORABUDPAR	
4	Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda	4	Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	4	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	Kurangnya minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	219	2,19222E+12	Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	Eksternal	C	Jumlah kejuaraan yang diikuti pelajar dan pemuda menurun	Pemerintah daerah, cabang olahraga, atlit/pemuda, dan pelajar	DINPORABUDPAR

**REKAP SKALA RISIKO STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Adanya kemungkinan gangguan keamanan pada destinasi wisata (Aspek Destinasi Pariwisata)	RSO.24	326	19	19	2.6	2.7	7.02
2	Kinerja POKDARWIS sebagai mitra pendukung pariwisata kurang optimal (Risiko kemitraan)	RSO.24	326	19	19	2.4	2.9	6.96
3	Kurangnya daya saing Obyek wisata yang dikelola BLUD berpotensi tidak berkembang (Aspek Pemasaran)	RSO.24	326	19	19	2.9	3.3	9.57
4	Kurangnya Even Kegiatan atau Acara Kesenian yang terselenggara untuk mendukung daya tarik wisata (Aspek Pemasaran Pariwisata)	RSO.24	326	19	19	3.0	3.2	9.6
5	Kurangnya sinergitas kinerja mitra pariwisata (Risiko Kemitraan)	RSO.24	326	19	19	2.6	3.0	7.8
6	Kurang optimalnya pengelolaan daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda (Aspek Destinasi)	RSO.24	326	19	19	2.6	2.6	6.76
7	Objek Madhang Maning Park : Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Madhang Maning Park (Aspek Kelembagaan)	RSO.24	326	19	19	3.0	3.3	9.9

8	Objek Wisata Menara Teratai : 1. Belum tercapainya ekspektasi pendapatan sesuai target (Aspek Pemasaran) 2. Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Menara Teratai (Aspek Kelembagaan)	RSO.24	326	19	19	3.0	3.4	10.2
9	Objek Wisata Tamana Botani : Tidak jelas nya objek wisata Taman Botani yang harusnya untuk wisata edukasi terkait Botani namun tidak terealisasi (Aspek Pemasaran Wisata)	RSO.24	326	19	19	3.0	3.4	10.2
10	Objek Wisata Taman Maskemambang : 1. Sedikit pengunjung ke Taman Apung Mas Kemambang pada jam operasional siang hari karena pengunjung kurang nyaman (Aspek Destinasi Wisata) 2. Penurunan tingkat kunjungan yang akan terjadi secara periodik (Aspek Destinasi Wisata)	RSO.24	326	19	19	3.0	3.6	10.8
11	Pendapatan tiket wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak optimal (risiko kecurangan)	RSO.24	326	19	19	2.7	3.1	8.37
12	Semakin langka dan punah kebudayaan di masyarakat	RSO.24	222	19	19	2.4	2.6	6.24
13	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas (Aspek Industri)	RSO.24	326	19	19	2.5	2.5	6.25
14	Pengurus Komite Ekonomi Kreatif kurang aktif (Aspek Kelembagaan)	RSO.24	326	19	19	2.3	2.7	6.21
15	Kurangnya minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	RSO.24	219	19	19	2.6	2.7	7.02

REKAP SKALA RISIKO OPERASIONAL
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSO.24	222	19	19				
1	Semakin langka dan punah kebudayaan di masyarakat	RSO.24	222	19	19	6.24	DINPORABUDPAR	Kurangnya sosialisasi dan fasilitasi kebudayaan di masyarakat	Berkurangnya pelaku budaya di lingkungan masyarakat
2	Kurang optimalnya pengelolaan daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda (Aspek Destinasi)	RSO.24	326	19	19	6.76	DINPORABUDPAR	Daya Tarik Wisata yang Ada terkesan monoton dan kurang inovatif::Promosi dan pemasaran destinasi wisata di kabupaten Banyumas kurang optimal	Menurunnya jumlah wisatawan dan Pendapatan daerah::Menurunnya jumlah wisatawan di kabupaten Banyumas
3	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas (Aspek Industri)	RSO.24	326	19	19	6.25	DINPORABUDPAR	fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang kurang optimal pada seluruh sub sektor ekonomi kreatif	Pelaku usaha dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif banyak yang tidak mampu bertahan
4	Kurangnya minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	RSO.24	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	Jumlah kejuaraan yang diikuti pelajar dan pemuda menurun
5	Adanya kemungkinan gangguan keamanan pada destinasi wisata (Aspek Destinasi Pariwisata)	RSO.24	326	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	Kurang disiplin petugas Pamgab	Pengunjung trauma bila ada kecelakaan
6	Kurangnya sinergitas kinerja mitra pariwisata (Risiko Kemitraan)	RSO.24	326	19	19	7.8	DINPORABUDPAR	Koordinasi terkendala karena PHRI DPC Kabupaten Banyumas tidak mempunyai sekretariat tetap	industri perhotelan dan restoran kurang optimal dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Banyumas
7	Kinerja POKDARWIS sebagai mitra pendukung pariwisata kurang optimal (Risiko kemitraan)	RSO.24	326	19	19	6.96	DINPORABUDPAR	SDM POKDARWIS kurang memiliki kompetensi dalam pengembangan pariwisata desa	kegiatan pariwisata di desa kurang berkembang dengan maksimal
8	Pengurus Komite Ekonomi Kreatif kurang aktif (Aspek Kelembagaan)	RSO.24	326	19	19	6.21	DINPORABUDPAR	Kurang koordinasi dan pengawasan Komite Ekonomi kreatif oleh Dinas	Sektor Ekonomi Kreatif Menjadi Kurang Berkembang
9	Kurangnya daya saing Obyek wisata yang dikelola BLUD berpotensi tidak berkembang (Aspek Pemasaran)	RSO.24	326	19	19	9.57	DINPORABUDPAR	1. sudah tidak ada daya jual dikarenakan tidak ada inovasi atau perubahan 2. tidak ada dukungan dari stakeholder terkait 3. keterbatasan untuk melakukan inovasi/ perubahan di setiap objek	1. penurunan tiket kunjungan setiap periodik 2. tidak adanya daya jual dari objek yang bisa ditawarkan kepada pihak ke 2 3. operasional objek bisa tidak tercover dari jumlah pendapatan objek

10	Pendapatan tiket wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak optimal (risiko kecurangan)	RSO.24	326	19	19	8.37	DINPORABUDPAR	Adanya kolusi antara pengunjung dengan petugas tiket/ pengelola tempat wisata	1. Dampak keuangan, 2. Dampak reputasi, 3. Dampak Kinerja, 4. Dampak budaya
11	Objek Wisata Menara Teratai : 1. Belum tercapainya ekspektasi pendapatan sesuai target (Aspek Pemasaran) 2. Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Menara Teratai (Aspek Kelembagaan)	RSO.24	326	19	19	10.2	DINPORABUDPAR	Banyaknya parkir di bahu jalan bungkarno dan di depan menara teratai yang tidak diberikan ketegasan oleh Dinas Perhubungan menyebabkan pengunjung lebih banyak parkir di bahu jalan dibandingkan di kantong parkir menara teratai::Masih belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan objek wisata PEN	Kurang maksimalnya pendapatan yang diperoleh BLUD::Penurunan angka pendapatan parkir
12	Objek Wisata Taman Maskemambang : 1. Sedikit pengunjung ke Taman Apung Mas Kemambang pada jam operasional siang hari karena pengunjung kurang nyaman (Aspek Destinasi Wisata) 2. Penurunan tingkat kunjungan yang akan terjadi secara periodik (Aspek Destinasi Wisata)	RSO.24	326	19	19	10.8	DINPORABUDPAR	Semua tanaman yang ada di Maskem adalah bibit dan kebanyakan tanah yang ada di Makem adalah bukan tanah subur sehingga butuh 20 tahun untuk pohon tsb bisa rindang dan pergantian tanah supaya tanamannya tumbuh. ::Tidak adanya daya tarik yang ada di Taman Apung Maskemambang dikarenakan orang hanya masuk melihat genangan air dan tanaman yang belum jadi.	Penurunan angka kunjungna karena jam berkunjung oleh pengunjungterbatas hanya di sore sampai dengan malam hari. ::Tidak akan lagi ada wisatawan yang datang ke Taman Apung Maskemambang.
13	Objek Wisata Tamana Botani : Tidak jelasnya objek wisata Taman Botani yang harusnya untuk wisata edukasi terkait Botani namun tidak terealisasi (Aspek Pemasaran Wisata)	RSO.24	326	19	19	10.2	DINPORABUDPAR	Informasi edukatif terkait tanaman tidak terdata dengan baik dan tidak beraturannya lokasi penataan tanaman-tanaman tsb.	Tingkat Kunjungan menurun drastis karena pengunjung merasa tidak ada konten edukatif yang diperoleh saat berkunjung ke Taman Botani
14	Objek Madhang Maning Park : Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Madhang Maning Park (Aspek Kelembagaan)	RSO.24	326	19	19	9.9	DINPORABUDPAR	Banyaknya parkir di depan Madhang Maning Park yang tidak diberikan ketegasan oleh Dinas Perhubungan menyebabkan pengunjung lebih banyak parkir di bahu jalan dibandingkan di kantong parkir Madhang Maning Park	Penurunan angka pendapatan parkir

15	Kurangnya Even Kegiatan atau Acara Kesenian yang terselenggara untuk mendukung daya tarik wisata (Aspek Pemasaran Pariwisata)	RSO.24	326	19	19	9.6	DINPORABUDPAR	Kurangnya kerjasama dengan penyelenggara event/ pelaku seni	Tidak terjadi peningkatan jumlah kunjungan di objek wisata
----	---	--------	-----	----	----	-----	---------------	---	--

**REKAP SKALA RISIKO PRIORITAS STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSO.23	222	19	19				
1	Semakin langka dan punah kebudayaan di masyarakat	RSO.23	222	19	19	5.52	DINPORABUDPAR	Kurangnya sosialisasi dan fasilitasi kebudayaan di masyarakat	Berkurangnya pelaku budaya di lingkungan masyarakat
2	Kurang optimalnya pengelolaan daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda (Aspek Destinasi)	RSO.23	326	19	19	6	DINPORABUDPAR	Daya Tarik Wisata yang Ada terkesan monoton dan kurang inovatif::Promosi dan pemasaran destinasi wisata di kabupaten Banyumas kurang optimal	Menurunnya jumlah wisatawan dan Pendapatan daerah::Menurunnya jumlah wisatawan di kabupaten Banyumas
3	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas (Aspek Industri)	RSO.23	326	19	19	6	DINPORABUDPAR	fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang kurang optimal pada seluruh sub sektor ekonomi kreatif	Pelaku usaha dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif banyak yang tidak mampu bertahan
4	Kurangnya minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	RSO.23	219	19	19	6.5	DINPORABUDPAR	Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	Jumlah kejuaraan yang diikuti pelajar dan pemuda menurun

5	Adanya kemungkinan gangguan keamanan pada destinasi wisata (Aspek Destinasi Pariwisata)	RSO.23	326	19	19	5.29	DINPORABUDPAR	Kurang disiplin petugas Pamgab	Pengunjung trauma bila ada kecelakaan
6	Kurangnya sinergitas kinerja mitra pariwisata (Risiko Kemitraan)	RSO.23	326	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	Koordinasi terkendala karena PHRI DPC Kabupaten Banyumas tidak mempunyai sekretariat tetap	industri perhotelan dan restoran kurang optimal dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Banyumas
7	Kinerja POKDARWIS sebagai mitra pendukung pariwisata kurang optimal (Risiko kemitraan)	RSO.23	326	19	19	4.6	DINPORABUDPAR	SDM POKDARWIS kurang memiliki kompetensi dalam pengembangan pariwisata desa	kegiatan pariwisata di desa kurang berkembang dengan maksimal
8	Pengurus Komite Ekonomi Kreatif kurang aktif (Aspek Kelembagaan)	RSO.23	326	19	19	4	DINPORABUDPAR	Kurang koordinasi dan pengawasan Komite Ekonomi kreatif oleh Dinas	Sektor Ekonomi Kreatif Menjadi Kurang Berkembang
9	Kurangnya daya saing Obyek wisata yang dikelola BLUD berpotensi tidak berkembang (Aspek Pemasaran)	RSO.23	326	19	19	7.2	DINPORABUDPAR	1. sudah tidak ada daya jual dikarenakan tidak ada inovasi atau perubahan 2. tidak ada dukungan dari stakeholder terkait 3. keterbatasan untuk melakukan inovasi/ perubahan di setiap objek	1. penurunan tiket kunjungan setiap periodik 2. tidak adanya daya jual dari objek yang bisa ditawarkan kepada pihak ke 2 3. operasional objek bisa tidak tercover dari jumlah pendapatan objek
10	Pendapatan tiket wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak optimal (risiko kecurangan)	RSO.23	326	19	19	4	DINPORABUDPAR	Adanya kolusi antara pengunjung dengan petugas tiket/ pengelola tempat wisata	1. Dampak keuangan, 2. Dampak reputasi, 3. Dampak Kinerja, 4. Dampak budaya

11	Objek Wisata Menara Teratai : 1. Belum tercapainya ekspetasi pendapatan sesuai target (Aspek Pemasaran) 2. Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Menara Teratai (Aspek Kelembagaan)	RSO.23	326	19	19	5.29	DINPORABUDPAR	Banyaknya parkir di bahu jalan bung karno dan di depan menara teratai yang tidak diberikan ketegasan oleh Dinas Perhubungan menyebabkan pengunjung lebih banyak parkir di bahu jalan dibandingkan di kantong parkir menara teratai::Masih belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan objek wisata PEN	Kurang maksimalnya pendapatan yang diperoleh BLUD::Penurunan angka pendapatan parkir
12	Objek Wisata Taman Maskemambang : 1. Sedikit pengunjung ke Taman Apung Mas Kemambang pada jam operasional siang hari karena pengunjung kurang nyaman (Aspek Destinasi Wisata) 2. Penurunan tingkat kunjungan yang akan terjadi secara periodik (Aspek Destinasi Wisata)	RSO.23	326	19	19	8.1	DINPORABUDPAR	Semua tanaman yang ada di Maskem adalah bibit dan kebanyakan tanah yang ada di Makem adalah bukan tanah subur sehingga butuh 20 tahun untuk pohon tsb bisa rindang dan pergantian tanah supaya tanamannya tumbuh. ::Tidak adanya daya tarik yang ada di Taman Apung Maskemambang dikarenakan orang hanya masuk melihat genangan air dan tanaman yang belum jadi.	Penurunan angka kunjungna karena jam berkunjung oleh pengunjungterbatas hanya di sore sampai dengan malam hari. ::Tidak akan lagi ada wisatawan yang datang ke Taman Apung Maskemambang.

13	Objek Wisata Tamana Botani : Tidak jelas nya objek wisata Taman Botani yang harusnya untuk wisata edukasi terkait Botani namun tidak terealisasi (Aspek Pemasaran Wisata)	RSO.23	326	19	19	5.75	DINPORABUDPAR	Informasi edukatif terkait tanaman tidak terdata dengan baik dan tidak beraturannya lokasi penataan tanaman-tanaman tsb.	Tingkat Kunjungan menurun drastis karena pengunjung merasa tidak ada konten edukatif yang diperoleh saat berkunjung ke Taman Botani
14	Objek Madhang Maning Park : Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Madhang Maning Park (Aspek Kelembagaan)	RSO.23	326	19	19	6.75	DINPORABUDPAR	Banyaknya parkir di depan Madhang Maning Park yang tidak diberikan ketegasan oleh Dinas Perhubungan menyebabkan pengunjung lebih banyak parkir di bahu jalan dibandingkan di kantong parkir Madhang Maning Park	Penurunan angka pendapatan parkir
15	Kurangnya Even Kegiatan atau Acara Kesenian yang terselenggara untuk mendukung daya tarik wisata (Aspek Pemasaran Pariwisata)	RSO.23	326	19	19	6.25	DINPORABUDPAR	Kurangnya kerjasama dengan penyelenggara event/ pelaku seni	Tidak terjadi peningkatan jumlah kunjungan di objek wisata

**REKAP SKALA RISIKO PRIORITAS OPERASIONAL
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		ROO.23	326	19	19				
1	SDM Pariwisata tidak berkopetensi(Aspek Indsutri Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	6	DINPORABUDPAR	kurangnya keahlian kompetensi peserta SDM Kepariwisataaan	banyaknya SDM pariwisata yang tidak kompeten
2	kurangnya motivasi pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang	ROO.23	326	19	19	6	DINPORABUDPAR	kurangnya apresiasi terhadap pelaku ekonomi kreatif	ekonomi kreatif kurang berkembang
3	Menurunnya daya tarik wisata (Aspek Destinasi Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	6.76	DINPORABUDPAR	kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan daya tarik wisata	menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah wisata
4	Desinasi wisata kurang berkembang	ROO.23	326	19	19	6.5	DINPORABUDPAR	Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan Destinasi Wisata	menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah
5	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer (Aspek Pemasaran Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	5.75	DINPORABUDPAR	media promosi dan pemasaran belum bisa diakses di luar negeri	kurang optimalnya kunjungan wisatawan
6	Minimnya pelatihan olahraga pendidikan bagu guru dan sanggar seni	ROO.23	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya jumlah pelatih bersertifikasi disatuan pendidikan	menurunnya prestasi atlet tingkat pelajar
7	tingkat kebugaran masyarakat menurun	ROO.23	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	minimnya fasilitas olahraga rekreasi yang tersedia	tingkat kesehatan masyarakat rendah
8	banyaknya organisasi olahraga yang kurang berkembang	ROO.23	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi organisasi olahraga yang terbina	banyak organisasi olahraga tidak berjalan dengan baik
9	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga	ROO.23	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	minimnya kompetisi olahraga yang terselenggara	menurunnya jumlah atlet yang berprestasi

10	Berkurangnya organisasi kepemudaan yang aktif	ROO.23	219	19	19	6.76	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi bagi organisasi kepemudaan	minimnya pertumbuhan organisasi kepemudaan
11	menurunnya prestasi kwartir cabang tergiat tingkat propinsi	ROO.23	219	19	19	5.76	DINPORABUDPAR	belum optimalnya kegiatan di kwartir cabang tingkat propinsi	menurunnya kualitas kegiatan di kwartir cabang
12	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula	ROO.23	219	19	19	6.75	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi bagi wirausaha muda pemula	kurangnya kapasitas dan kompetensi wirausaha muda pemula
13	Minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di kabupaten Banyumas	ROO.23	222	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi pelestarian kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas	kesenian tradisional tidak mempunyai regenerasi dan dapat punah
14	kurang berkembangnya kesenian tradisional di Kabupaten Banyumas	ROO.23	222	19	19	6.24	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi kesenian tradisional	kesenian tradisional semakin tidak diminati masyarakat
15	Budaya dan adat istiadat masyarakat setempat akan punah	ROO.23	222	19	19	6.5	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi kegiatan budaya dan adat istiadat di masyarakat	Adat istiadat masyarakat tidak dapat berkembang
16	Kebudayaan Daerah akan punah dan tergeser dengan budaya modern	ROO.23	222	19	19	6.5	DINPORABUDPAR	pengenalan budaya daerah ke masyarakat khususnya generasi muda kurang optimal	terjadi perubahan budaya akibat pengaruh globalisasi
17	minimnya pengetahuan sejarah lokal di masyarakat	ROO.23	222	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi pembinaan sejarah lokal	pelestarian sejarah lokal kurang maksimal
18	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan cagar budaya	ROO.23	222	19	19	6.5	DINPORABUDPAR	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Objek Diduga Cagar Budaya serta perlindungannya	tidak tercapainya Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan
19	Banyaknya cagar budaya yang rusak atau hilang	ROO.23	222	19	19	6.76	DINPORABUDPAR	kurang terpeliharanya cagar budaya	Banyak cagar budaya yang punah atau hilang
20	Masyarakat tidak melaporkan dan menyerahkan benda yang dikategorikan koleksi museum kepada pihak pengelola museum	ROO.23	222	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurang kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan terhadap	kurang berkembangnya koleksi museum

								benda yang termasuk kategori museum	
21	Objek Wisata Andhang Pangrenan : - Kurangnya Penerangan disekitar Andhang Pangrenan - Kurangnya Kegiatan/acara yang terselenggara (Destinasi Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	9	DINPORABUDPAR	- Banyaknya Lampu yang padam di objek wisata Andhang Pangrenan - Kurangnya Kerjasama dengan pihak lain	- Menurunnya jumlah pengunjung yang datang pada malam hari - Belum adanya kegiatan rutin yang terselenggara
22	Objek Wisata Kalibacin : - Fasilitas Pendukung (Kursi, Loker) Kurang Memadai - Kurangnya kapasitas lahan Parkir (Aspek Destinasi Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	8.1	DINPORABUDPAR	- Kursi yang ada masih terbatas dan belum adanya loker untuk menaruh barang pengunjung - Pengunjung Parkir sembarangan	- Kurangnya kenyamanan pengunjung ketika berada di Objek Wisata Kalibacin - Mengganggu aksesibilitas lingkungan sekitar
23	Objek Wisata Museum Wayang Banyumas : Kurang menarik nyapenataan koleksi di Museum Wayang sendang mas (Aspek Destinasi Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	7.56	DINPORABUDPAR	Kurangnya Inovasi dalam penataan Koleksi di Museum Wayang	Wisatawan Kurang berminat untuk berkunjung kembali
24	Objek Wisata THR Pangsar Soedirman : Kurangnya pertunjukan di OW THR Pangsar Soedirman untuk menarik pengunjung (Aspek Pemasaran Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	7.84	DINPORABUDPAR	Kurangnya kolaborasi dengan sekolah/perguruan tinggi	Belum adanya kegiatan rutin yang terselenggara untuk menarik pengunjung
25	Objek Wisata Menara Teratai: 1. Minimnya kunjungan ulang ke objek wisata (Aspek Industri Pariwisata) 2. Masih belum sinergi pengelolaan objek	ROO.23	326	19	19	6.75	DINPORABUDPAR	1. Belum adanya regulasi/ kebijakan yang mengatur	1. Kurang maksimalnya pendapatan dan adanya konflik kepentingan

	wisata dengan beberapa pemangku kepentingan (Aspek Kelembagaan Pariwisata) 3. Wisatawan kurang merasa nyaman berkunjung ke objek wisata (Aspek Industri Pariwisata)							2. kurang beragamnya wahana yang bisa dinikmati pengunjung 3. Kurang beragamnya wahana yang bisa dinikmati pengunjung	2. penurunan tingkat kunjungan wisata 3. Penurunan tingkat kunjungan wisata
26	Objek wisata Taman Apung Mas Kemambang: Kurangnya daya tarik pengunjung objek wisata Taman Apung Mas Kemambang dari sarana dan prasarana, kondisi kolam yang tidak bisa menampung air, fasilitas pendukung yang tidak memadai dan keberadaan UMKM yang tidak laku (Aspek Industri)	ROO.23	326	19	19	6.75	DINPORABUDPAR	1. Kolam apung yang dibangun terjadi kebocoran dikarenakan di bawah kolam tidak di COR sehingga terjadi sedimentasi. 2. Lokasi Food Container jauh dari pusat kunjungan yang ada di Maskemambang. 3. Toilet yang dibangun hanya ada 3 titik dan itu berjauhan jaraknya.	1. 1. Kolam yang dibangun lambat laun akan runtuh karena erosi. 2. Apabila debit air dikecilkan maka tidak akan terlihat seperti kolam dan pengunjung tidak akan tertarik. 2. Mangkraknya bangunan Food Container dan tidak ada pemasukan dari Sewa lahan 3. Pengunjung akan kapok dan tidak mengulangi kunjungannya
27	Objek wisata Taman Botani Baturraden: 1. Tingkat kunjungan wisatawan cenderung stagnan (Aspek Destinasi) 2. Cottage yang dibangun tidak jelas peruntukannya (Aspek Industri)	ROO.23	326	19	19	5.75	DINPORABUDPAR	Design dari cottage tidak beraturan, contoh : Bangunan dua lantai tapi hanya ada toilet di lantai bawah. ::Tamanam yang ditanam tidak jelas, tidak teratur, dan belum tentu akan tumbuh maupun hidup untuk menjadi daya tarik.	Pengelola tidak dapat meyewakannya kepada pelaku usaha, sehingga tidak bisa menambah pemasukan::Taman Botani akan tutup operasional dan mangkrak.

28	Penyalahgunaan anggaran hibah oleh organisasi kepramukaan (risiko kecurangan)	ROO.23	219	19	19	4	DINPORABUDPAR	1. penyalahgunaan wewenang pengurus kwarcab dalam pemanfaatan dana hibah. 2. Rasionalisasi. 3. Tekanan ekonomi	1. Dampak keuangan. 2. Dampak Reputasi. 3. Dampak Hukum. 4. Dampak Kinerja. 5. Dampak Budaya
29	Objek Wisata Madhang Maning Park : Tidak berkembangnya OW Madang Maning Park dimana UMKM pendukung tutup dan memutus kontrak kerja (Aspek Industri)	ROO.23	326	19	19	8.4	DINPORABUDPAR	1. Pelaku usaha akan lebih memilih jualan di kawasan Jl. Bung Karno tepatnya di depan bangunan Gedung Madhang Maning Park. 2.Kurangnya daya jual atau daya tawar dari objek Madhang Maning Park.:Semua OPD ketika kegiatan rapat yang membutuhkan konsumsi lebih suka mencari konsumsi dari tempat lain.	Ketika semua pelaku UMKM yang di MMP tidak mendapat dukungan dari pemerintah MMP tidak akan memiliki nilai jual untuk disewakan.:Tutup Operasional/Tutupnya gedung Madhang Maning Park
30	1. terjadi kemacetan lalu lintas menuju objek wisata, 2. Bus penunjang pariwisata tidak beroperasi sesuai jadwal operasi (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	6.24	DINPORABUDPAR	1. lalu lintas tidak terkendali / macet, 2. terjadi kerusakan pada Bus Pariwisata	Calon wisatawan kecewa karena menunggu lama, terjadi kemacetan menuju objek wisata
31	Jalan Menuju OW banyak yang rusak dan belum ada perbaikan (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	5.6	DINPORABUDPAR	Kurang respon dari Dinas Pekerjaan Umum	wisatawan enggan melewati jalan rusak menuju objek wisata
32	Menumpuknya sampah di OW (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	7.28	DINPORABUDPAR	Menimbulkan bau tidak sedap dan membuat tidak nyaman pengunjung	Wisata merasa terganggu kenyamanannya.
33	Belum sinerginya peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam mendukung program desa wisata (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	6.72	DINPORABUDPAR	Kurangnya alokasi prioritas anggaran OPD lain dalam membina desa wisata	desa wisata kurang berkembang

34	Belum tertatanya PKL di kawasan wisata (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	5.2	DINPORABUDPAR	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan/ penataan PKL di kawasan wisata	Tidak nyamannya pengunjung wisata
35	UMKM pariwisata yang ada kurang berkembang (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	4.16	DINPORABUDPAR	kurang adanya inovasi dan kreativitas terhadap produk yang dijual dikawasan wisata	pengunjung cenderung bosan dengan barang dagangan yang ada
36	aplikasi Dolan Banyumas tidak berjalan lancar (Risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	5.2	DINPORABUDPAR	kurang kontrol terhadap pemeliharaan software aplikasi pariwisata	software tidak berjalan lancar, transaksi menjadi bermasalah
37	Peluang retribusi pariwisata yang tidak bisa ditarik/dipungut (risiko kemitraan)	ROO.23	326	19	19	8.4	DINPORABUDPAR	objek retribusi belum masuk Perda	Potensi pendapatan berkurang
38	Objek Wisata Bukit Bintang : Area Bukit Bintang akan menjadi bangunan mangkrak (Aspek Destinasi)	ROO.23	326	19	19	7.28	DINPORABUDPAR	Bangunan belum siap jual dan belum siap pakai dikarenakan belum ada jaringan listrik dan toilet.	Para penyelenggara event tidak akan mau untuk membuat event di Bukit Bintang karena biaya produksi event nya belum tersedia untuk pemenuhan jaringan listrik dan pemenuhan fasilitas toilet.

39	Objek Indraprana : Bangunan Indraprana terancam mangrak (Aspek Destinasi)	ROO.23	326	19	19	7.28	DINPORABUDPAR	Design Bangunan Indraprana yang tidak begitu jelas peruntukannya dan memiliki risiko longsor(karena ditepi sungai) dan sudah terjadi retakan bangunan menjadikan pelaku usaha atau UMKM tidak berminat memanfaatkan bangunan tersebut.:Tidak adanya ketegasan dari Dinas Perhubungan terkait jalur wisata untuk melewati bangunan Indraprana dan terkesan melakukan pembiaran untuk semrawutnya jalur di area Baturraden.	Bangunan Indraprana tidak laku dijual atau disewakan.:Dengan tidak diwajibkan jalur wisata melewati Indraprana maka tidak akan ada pengunjung atau orang yang tau mengenai bangunan Indraprana.
40	Terjadi kelangkaan pengunjung yang naik ke area Loakwisata Baturraden, Indraprana, Taman Botani dan Bukit Bintang (Aspek Destinasi Pariwisata)	ROO.23	326	19	19	5.76	DINPORABUDPAR	Setiap kendaraan umum (terutama bis) yang berhenti di terminal bawah baturraden di intervensi oleh koprades untuk dialihkan ke objek wisata lain seperti limpakuwus dikarenakan tarif nya lebih besar.	Banyak terjadi pungli premanisme dan ketidaknyamanan pengunjung untuk berkunjung ke Baturraden menggunakan kendaraan umum terutama Bis.

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
	Kurangnya disiplin dan motivasi kerja PNS	telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan jam kerja, disiplin, serta motivasi kerja kepada seluruh PNS dilingkungan Dinporabdpar Kab. Banyumas	KE	1	meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap jam kerja, disiplin, serta motivasi kerja kepada seluruh PNS dilingkungan Dinporabdpar kab. Banyumas	Dinporabdpar Kab. Banyumas	Tahun 2023 - 2024
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK MENGATASI RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Semakin langka dan punah kebudayaan di masyarakat		ditetapkannya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	mengadakan sosialisasi dan koordinasi implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas kepada masyarakat dan pelaku budaya	Dinporabudpar	Tahun 2023 - Tahun 2024
2	Kurang optimalnya pengelolaan daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda (Aspek Destinasi)		meningkatkan inovasi pada destinasi wisata yang bisa menarik minat wisatawan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	merencanakan inovasi baru sebagai daya tarik wisata pada destinasi wisata yang dikelola pemda	Dinporabudpar	Tahun 2023 - Tahun 2024
3	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas (Aspek Industri)		mengadakan workshop ekonomi kreatif	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	mengadakan workshop dengan pelaku ekonomi kreatif	Dinporabudpar	Tahun 2023 - Tahun 2024
4	Kurangnya minat serta motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi		mengadakan fasilitasi terhadap pemuda yang akan mengikuti kejuaraan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	mengadakan fasilitasi terhadap pemuda yang akan mengikuti kejuaraan	Dinporabudpar	Tahun 2023 - Tahun 2024
5	Adanya kemungkinan gangguan keamanan pada destinasi wisata (Aspek Destinasi Pariwisata)		Rapat koordinasi dan pelaporan antisipasi gangguan keamanan dan kecelakaan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan koordinasi pengamanan gabungan destinasi dan pelaporan bila ada gangguan keamanan atau kecelakaan	Bidang Pariwisata	1 tahun
6	Kurangnya sinergitas kinerja mitra pariwisata (Risiko Kemitraan)		rapat koordinasi dengan mitra pariwisata	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	memfasilitasi sekretariat PHRI dan mengintensifkan koordinasi dengan mitra pariwisata	Bidang Pariwisata	1 tahun

7	Kinerja POKDARWIS sebagai mitra pendukung pariwisata kurang optimal (Risiko kemitraan)		Mendata calon peserta pelatihan kepariwisataan dari SDM POKDARWIS	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1, mengintensifkan temu mitra, 2, mengikutsertakan SDM POKDARWIS dalam pelatihan kepariwisataan	Bidang Pariwisata	1 tahun
8	Pengurus Komite Ekonomi Kreatif kurang aktif (Aspek Kelembagaan)		Updating SK Pengurus Komite Ekonomi Kreatif dan rapat temu komite ekonomi kreatif	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	mengintensifkan temu komite ekonomi kreatif, memfasilitasi peningkatan SDM pelaku komite ekonomi kreatif	Bidang Pariwisata	1 tahun
9	Kurangnya daya saing Obyek wisata yang dikelola BLUD berpotensi tidak berkembang (Aspek Pemasaran)		penambahan fasilitas, pemeliharaan sarpras dan promosi objek wisata yg dikelola BLUD	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan objek wisata yang dikelola BLUD	BLUD Lokawisata Baturraden	1 tahun
10	Pendapatan tiket wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak optimal (risiko kecurangan)		1. Penguatan integritas melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan tata kelola yang baik 2. SOP tiket masuk pengunjung dan pemanfaatan lahan pada daya tarik wisata yang dikelola Pemda.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Perbaiki atau revisi SOP tiket masuk pengunjung dan pemanfaatan lahan pada daya tarik wisata yang dikelola Pemda. 2. Mengoptimalkan penggunaan Cashless pada tiket masuk objek wisata yang dikelola pemda.	Bidang Pariwisata, Ka UPT Purwomas, Ka UPT BLUD Lokawisata Baturraden	1 tahun
11	Objek Wisata Menara Teratai : 1. Belum tercapainya ekspektasi pendapatan sesuai target (Aspek Pemasaran) 2. Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Menara Teratai (Aspek Kelembagaan)		BLUD membuat banyak event untuk menjadi sumber pendapatan tambahan.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan objek wisata PEN oleh Dinporabudpar, BLUD, dan Bappedalitbang	Dinporabudpar, BLUD, dan Bappedalitbang	1 Tahun
12	Objek Wisata Menara Teratai : 1. Belum tercapainya ekspektasi		BLUD pernah bekerja sama dengan BABINSA untuk	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Dinas Perhubungan dan Satpol PP harus mulai bekerja untuk menertibkan dan	Dinas Perhubungan Kabupaten	1 Tahun

	pendapatan sesuai target (Aspek Pemasaran) 2. Penurunan tingkat pendapatan parkir di Area Menara Teratai (Aspek Kelembagaan)		mengusir PKL dan Parkir Liar (karena SATPOLPP, Dinperindag, dan Dishub) membiarkan). Namun Pimpinan PKL dan Parkir Liar meminta untuk menghentikan tindakan pengusiran yang dijalankan oleh BLUD			menghilangkan parkir liar tersebut.	Banyumas ,SATPOL PP , DINPERINDAG	
13	Objek Wisata Taman Maskemambang : 1. Sedikit pengunjung ke Taman Apung Mas Kemambang pada jam operasional siang hari karena pengunjung kurang nyaman (Aspek Destinasi Wisata) 2. Penurunan tingkat kunjungan yang akan terjadi secara periodik (Aspek Destinasi Wisata)		Dinpora dan BLUD membuat perencanaan DED untuk menambah daya tarik (Kolam renang dan Air mancur warna/dancing water fountain) dan BLUD menggunakan terpal atau plastik untuk mengurangi tingkat kebocoran dan mengurangi debit air kolam untuk meminimalisir resiko erosi.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evalusi Perencanaan dan Pembangunan Oleh Dinporabudpar, BAPPEDALITBANG, dan DLH	Dinporabudpar, Bappedalitbang, dan DLH	1 Tahun
14	Objek Wisata Tamana Botani : Tidak jelas nya objek wisata Taman Botani yang harusnya untuk wisata edukasi terkait Botani namun tidak terealisasi (Aspek Pemasaran Wisata)		Sebelum pembukaan BLUD harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar (s.d 500jt) untuk menambah tanaman dan daya tarik.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dinpora dan Bappedalitbang harus di evaluasi dalam perencanaan pembangunan Taman Botani Baturraden	Dinporabudpar dan Bappedalitbang	1 Tahun
15	Objek Madhang Maning Park : Penurunan tingkat pendapatan parkir di		BLUD pernah bekerja sama dengan BABINSA untuk mengusir PKL dan	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Satpol PP & Dinperindag harus mulai bekerja untuk menertibkan dan	DISHUB dan SATPOL PP	1 Tahun

	Area Madhang Maning Park (Aspek Kelembagaan)		Parkir Liar (karena SATPOLPP, Dinperindag, dan Dishub) membiarkan). Namun Pimpinan PKL dan Parkir Liar meminta untuk menghentikan tindakan pengusiran yang dijalankan oleh BLUD			menghilangkan parkir liar tersebut.		
16	Kurangnya Even Kegiatan atau Acara Kesenian yang terselenggara untuk mendukung daya tarik wisata (Aspek Pemasaran Pariwisata)		Melakukan kerja sama dengan pelaku seni	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menambah kerja sama tidak hanya dengan pelaku seni saja, tetapi juga dengan penyelenggara event baik dalam maupun luar daerah	Dinporabudpar	1 Tahun

6	memfasilitasi sekretariat PHRI dan mengintensifkan koordinasi dengan mitra pariwisata	Rapat Koordinasi	Dinporabudpar	PHRI DPC Kab. Banyumas	Triwulan I	Triwulan II								
7	1, mengintensifkan temu mitra, 2, mengikutsertakan SDM POKDARWIS dalam pelatihan kepariwisataan	Pelatihan/Bimtek	Bidang Pariwisata	Pengurus Pokdarwis		Triwulan II	Triwulan III							
8	mengintensifkan temu komite ekonomi kreatif, memfasilitasi peningkatan SDM pelaku komite ekonomi kreatif	Rapat Koordinasi	Bidang Pariwisata	Komite Ekonomi Kreatif Kab. Banyumas	Triwulan I	Triwulan II								
9	menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan objek wisata yang dikelola BLUD	Pengalokasian anggaran untuk menambah wahana/ DTW	DPU	BLUD			Triwulan III	Triwulan IV						

10	<p>1. Perbaiki atau revisi SOP tiket masuk pengunjung dan pemanfaatan lahan pada daya tarik wisata yang dikelola Pemda.</p> <p>2. Optimalisasikan penggunaan Cashless pada tiket masuk objek wisata yang dikelola pemda.</p>	Rapat Koordinasi	Dinporabudpar	UPT Purwomas dan UPT BLUD Lokawisata			Triwulan III	Triwulan IV						
11	<p>Melakukan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan objek wisata PEN oleh Dinporabudpar, BLUD, dan Bappedalitbang</p>	Rapat evaluasi	BLUD	BLUD		Triwulan II		Triwulan IV						

12	Dinas Perhubungan dan Satpol PP harus mulai bekerja untuk menertibkan dan menghilangkan parkir liar tersebut.	Rapat koordinasi	BLUD	BLUD		Triwulan II		Triwulan IV					
13	Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Oleh Dinporabudpar, BAPPEDALITBANG, dan DLH	Rapat koordinasi Dinporabudpar, DLH dan Bappedalitbang	BLUD	BLUD		Triwulan II		Triwulan IV					
14	Dinpora dan Bappedalitbang harus di evaluasi dalam perencanaan pembangunan Taman Botani Baturraden	Koordinasi Dinporabudpar, BLUD dan Bappedalitbang	BLUD	Objek wisata Taman Botani		Triwulan II	Triwulan III						
15	Satpol PP & Dinperindag harus mulai bekerja untuk menertibkan dan menghilangkan parkir liar tersebut.	Koordinasi dengan Satpol PP dan Dinperindag	BLUD	Objek Madhang Maning Park			Triwulan III	Triwulan IV					

16	Menambah kerja sama tidak hanya dengan pelaku seni saja, tetapi juga dengan penyelenggara event baik dalam maupun luar daerah	Media sosial (Instagram, dll)	Bidang Pariwisata	Sekolah, kelompok masyarakat		Triwulan II	Triwulan IV						
----	---	-------------------------------	-------------------	------------------------------	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melibatkan SKPD, sekolah, dan sanggar untuk terlibat di dalam setiap kegiatan pementasan kebudayaan	Sosialisasi	Dinporabudpar Bidang Kebudayaan	2024		
2	Reorganisasi KNPI Kabupaten	Musda KNPI	Dinporabudpar Bidang Kepemudaan	2024		
3	Melakukan penjangkaran terhadap atlet usia dini	Kejuaraan	Dinporabudpar Bidang Olahraga	2024		
4	Melakukan event-event Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Event Ekonomi Kreatif	Dinporabudpar Bidang Pariwisata	2024		
5	Meningkatkan kegiatan pemuda pemandu wisata	Pelatihan	Dinporabudpar (Bidang Kepemudaan)	2024		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS OPD
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	kurangnya minat masyarakat terhadap wisata budaya	RSO.21..19.19					Melibatkan SKPD, sekolah, dan sanggar untuk terlibat di dalam setiap kegiatan pentas kebudayaan	2024-2026		
2	minimnya prestasi pemuda dan peran aktif pemuda dalam masyarakat	RSO.21..19.19					Reorganisasi KNPI Kabupaten	2024-2026		
3	minimnya keikutsertaan pemuda dan pelajar dalam kejuaraan olahraga	RSO.21..19.19					Melakukan penjangkaran terhadap atlet usia dini	2024-2026		
4	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas	RSO.21..19.19					Melakukan event-event Ekonomi Kreatif	2024-2026		
5	minimnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	RSO.21..19.19					Meningkatkan kegiatan pemuda pemandu wisata	2024-2026		

HASIL CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

